

Konflik Islam dan Kristen dalam Perubahan Sosial, Geografi, Ekologi, dan Kebencanaan di Aceh Singkil

Siti Sardiana, Pulung Sumantri, Muhammad Adika Nugraha

Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 01 Agustus 2024
Revisi Akhir: 17 Agustus 2024
Diterbitkan Online: 28 Agustus 2024

KATA KUNCI

Konflik agama, Aceh Singkil, perubahan sosial, geografi, ekologi, bencana.

KORESPONDENSI

Phone:

E-mail: sitisardiana@gmail.com

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konflik antara komunitas Islam dan Kristen di Aceh Singkil dengan pendekatan multidimensi yang mencakup aspek sosial, geografis, ekologis, dan kebencanaan. Pendekatan kualitatif digunakan melalui metode studi kasus, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tidak semata-mata dilatarbelakangi oleh perbedaan agama, melainkan juga oleh perubahan struktur sosial akibat migrasi, ketimpangan akses terhadap sumber daya, kerusakan lingkungan, serta penanganan bencana yang tidak merata. Identitas keagamaan yang kuat, ditambah dengan minimnya ruang dialog dan lemahnya kebijakan inklusif, memperparah ketegangan antar kelompok. Rumah ibadah menjadi simbol resistensi dan representasi eksistensi kelompok, sehingga sering kali menjadi titik rawan konflik. Temuan ini sejalan dengan teori konflik sosial Coser dan teori identitas sosial Tajfel, serta diperkuat oleh teori ekologi politik Bryant & Bailey. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan lintas sektor yang melibatkan dialog antaragama, pembangunan berbasis keadilan sosial, dan penguatan peran masyarakat lokal. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi akademik sekaligus masukan kebijakan bagi pemangku kepentingan dalam merancang solusi jangka panjang yang lebih inklusif dan berkelanjutan di wilayah multikultural seperti Aceh Singkil.

PENDAHULUAN

Di sudut barat laut Pulau Sumatera, terdapat sebuah wilayah yang indah namun menyimpan kisah panjang tentang keragaman dan ketegangan: Aceh Singkil. Wilayah ini menjadi saksi sejarah bagaimana interaksi antara kelompok Islam dan Kristen berlangsung dalam dinamika sosial yang tidak selalu berjalan mulus. Di balik kedamaian alamnya, terdapat pergeseran sosial dan ketegangan identitas yang masih relevan untuk ditelaah hingga hari ini. Aceh Singkil adalah daerah yang unik karena menjadi pertemuan antara dua kelompok keagamaan besar di Indonesia, yakni Islam sebagai mayoritas dan Kristen sebagai minoritas signifikan. Ketegangan antara keduanya tidak hanya disebabkan oleh perbedaan keyakinan, namun juga oleh faktor-faktor eksternal seperti politik lokal, kebijakan pembangunan, serta tekanan ekologis dan geografis.

Konflik yang terjadi di Aceh Singkil bukan semata-mata persoalan agama. Ia lebih luas daripada itu—ia adalah cermin dari perubahan sosial yang terjadi seiring waktu. Ketika masyarakat mengalami mobilitas sosial, perubahan mata pencaharian, atau dampak pembangunan, hubungan antar komunitas juga turut berubah, kadang memburuk jika tidak ada upaya dialog dan penyelesaian yang adil. Dalam konteks ini, konflik Islam dan Kristen dapat dipahami sebagai bagian dari respon terhadap perubahan sosial yang tidak merata. Misalnya, akses terhadap sumber daya alam yang mulai terbatas, distribusi ekonomi yang timpang, serta kebijakan daerah yang kurang akomodatif terhadap pluralisme, turut menyulut ketegangan yang berujung pada konflik horizontal.

Geografi Aceh Singkil yang berbatasan langsung dengan laut dan dikelilingi hutan rawa juga memberi pengaruh besar terhadap interaksi masyarakatnya. Sebagian besar komunitas menggantungkan hidup dari alam, seperti bertani, melaut, dan berburu. Ketika terjadi perubahan geografi seperti abrasi pantai atau penggundulan hutan, masyarakat kehilangan sumber penghidupan—dan pada titik itu, konflik bisa muncul karena saling menyalahkan atau memperebutkan sumber daya yang tersisa. Selain itu, ekologi yang berubah akibat eksploitasi lahan, deforestasi, dan bencana ekologis lainnya seperti banjir atau tanah longsor juga turut memperkeruh keadaan. Bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga memperparah konflik sosial karena mempersempit ruang hidup dan mempertinggi ketegangan antar kelompok. Bencana yang terjadi secara berkala di Aceh Singkil, baik yang bersifat alamiah maupun ekologis, menjadi ujian bagi solidaritas sosial masyarakatnya. Sayangnya, seringkali solidaritas tersebut justru terpecah oleh sentimen sektarian yang semakin menguat pasca krisis. Bantuan yang tidak merata, ketidakadilan dalam rehabilitasi, atau stigma sosial menjadi pemicu konflik susulan. Dalam banyak kasus, tempat ibadah menjadi simbol perlawanan sekaligus titik panas konflik. Gereja yang didirikan di desa-desa mayoritas Muslim sering kali menjadi pusat kontroversi. Di sisi lain, komunitas Kristen merasa hak mereka untuk beribadah dilanggar. Ketegangan ini menunjukkan bagaimana konflik identitas bisa muncul dari persoalan yang sebenarnya teknis namun sensitif secara sosial.

Dalam masyarakat yang hidup berdampingan dengan latar belakang yang berbeda, ruang-ruang kompromi dan komunikasi sangat diperlukan. Namun, bila ruang ini tertutup oleh dominasi politik tertentu atau regulasi yang tidak berpihak pada keadilan sosial, maka konflik menjadi tak terhindarkan. Penting untuk memahami bahwa konflik ini bukanlah konflik antar individu, melainkan konflik antar kelompok sosial yang membawa identitas kolektif. Ketika identitas tersebut dipolitisasi atau digunakan untuk kepentingan kekuasaan, maka ketegangan semakin sukar diurai. Ini pula yang tampak dalam dinamika politik lokal Aceh Singkil, di mana isu agama sering kali dijadikan alat untuk memperoleh legitimasi.

Dalam kerangka besar, kita harus melihat konflik ini sebagai bagian dari perubahan struktural. Globalisasi, tekanan ekonomi, dan ekspansi industri juga turut mendorong migrasi dan perubahan pola hidup, yang pada akhirnya memengaruhi keseimbangan sosial di tingkat lokal. Ketika keseimbangan itu goyah, maka potensi konflik pun membesar. Masyarakat Aceh Singkil kini hidup di antara dua kutub: menjaga tradisi dan menghadapi modernisasi. Dalam transisi ini, gesekan kerap terjadi terutama jika perbedaan keyakinan menjadi pembeda utama dalam kehidupan sosial sehari-hari. Toleransi diuji, dan konflik menjadi indikator bahwa ada sesuatu yang belum selesai dalam proses perubahan ini.

Dari perspektif ekologi politik, konflik ini juga menyiratkan perebutan kontrol atas ruang dan sumber daya. Siapa yang berhak atas hutan? Siapa yang mendapat izin membangun rumah ibadah? Siapa yang menguasai akses terhadap pendidikan atau bantuan pasca bencana? Pertanyaan-pertanyaan ini jarang dijawab dengan objektif karena selalu bersinggungan dengan relasi kuasa dan mayoritas-minoritas. Dengan mempelajari dinamika di Aceh Singkil secara mendalam, kita dapat belajar bahwa konflik sosial tidak pernah tunggal sebabnya. Ia bersifat kompleks dan saling terkait antara aspek sosial, geografis, ekologis, dan kebencanaan. Untuk itu, pendekatan solutif juga harus lintas bidang dan tidak hanya bertumpu pada penyelesaian administratif semata.

Pendekatan rekonsiliasi, pembangunan partisipatif, dan penguatan nilai-nilai lokal yang menjunjung tinggi kedamaian dan keberagaman menjadi penting untuk dihidupkan kembali. Karena pada akhirnya, Aceh Singkil bukan hanya tentang konflik, tapi juga tentang harapan untuk hidup bersama dalam perbedaan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konflik Sosial

Konflik sosial menurut Lewis A. Coser (1956) merupakan bentuk pertentangan antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan, nilai, atau norma. Dalam konteks Aceh Singkil, konflik antara komunitas Islam dan Kristen dapat dimaknai sebagai konflik horizontal yang dipicu oleh perbedaan identitas, akses terhadap sumber daya, dan ketimpangan sosial. Ralf Dahrendorf (1959) juga menekankan bahwa konflik adalah hasil dari ketimpangan kekuasaan dan otoritas yang tidak merata dalam masyarakat.

2. Pluralisme dan Relasi Antaragama

Teori pluralisme agama yang dikembangkan oleh Diana L. Eck (2001) menjelaskan pentingnya pengakuan atas keberadaan berbagai agama dalam satu wilayah, bukan hanya sebagai toleransi pasif tapi pengakuan aktif terhadap keberagaman. Dalam konteks Aceh Singkil, ketegangan antara Islam dan Kristen bisa terjadi karena belum terciptanya ruang dialog yang sehat. Menurut Mark Woodward (2012), konflik antaragama di Indonesia sering kali dipicu oleh politisasi identitas keagamaan, bukan semata soal teologi.

3. Perubahan Sosial

Menurut Soekanto (2006), perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan ini bisa terjadi akibat perkembangan ekonomi, pendidikan, migrasi, atau bencana. Di Aceh Singkil, masuknya kelompok pendatang dan perubahan pola hidup masyarakat memicu ketegangan antar komunitas yang awalnya hidup berdampingan secara harmonis.

4. Geografi Konflik

Geografi memiliki peran penting dalam menciptakan atau meredakan konflik. Berdasarkan teori geopolitik lokal (Agnew, 2003), batas wilayah, akses terhadap ruang, dan sebaran permukiman berpengaruh pada dinamika konflik. Aceh Singkil, yang memiliki kondisi geografis terpencil, rawa-rawa, serta keterbatasan akses jalan dan fasilitas umum, menjadikan daerah ini rawan akan kesenjangan antar kelompok.

5. Ekologi dan Krisis Lingkungan

Perubahan ekologi menjadi faktor penting yang mendorong terjadinya konflik. Menurut teori ekologi politik (Bryant & Bailey, 1997), degradasi lingkungan dan perebutan akses terhadap sumber daya alam seringkali menjadi pemicu konflik antar kelompok masyarakat. Deforestasi, alih fungsi lahan, dan eksploitasi sumber daya di Aceh Singkil mempersempit ruang hidup, terutama bagi masyarakat adat dan kelompok minoritas.

6. Bencana dan Ketimpangan Sosial

Bencana alam dapat memperparah konflik sosial jika tidak dikelola dengan adil. Menurut Oliver-Smith (1996), dalam masyarakat multikultural, distribusi bantuan bencana yang tidak adil bisa menimbulkan ketidakpercayaan antar kelompok. Dalam konteks Aceh Singkil, beberapa laporan menunjukkan ketimpangan dalam penanganan pascabencana yang kemudian memperkuat polarisasi antara kelompok mayoritas dan minoritas.

7. Teori Identitas Sosial

Henri Tajfel dan John Turner (1986) menjelaskan bahwa manusia cenderung mengidentifikasi diri dalam kelompok tertentu (ingroup) dan membandingkannya dengan kelompok lain (outgroup). Dalam situasi konflik, identitas keagamaan bisa menjadi pemicu utama munculnya stereotip, diskriminasi, dan kekerasan. Hal ini relevan dalam kasus Aceh Singkil, di mana narasi identitas mayoritas-minoritas menjadi titik tolak konflik.

8. Hukum dan Kebijakan Daerah

Aspek regulasi juga tak dapat diabaikan. Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Qanun-Qanun lokal, pemerintah daerah memiliki otoritas dalam menetapkan kebijakan agama dan kehidupan sosial. Dalam praktiknya, beberapa kebijakan lokal dinilai tidak berpihak pada komunitas minoritas, seperti dalam hal pendirian rumah ibadah. Hal ini menjadi salah satu sumber kecurigaan dan ketegangan.

9. Mediasi dan Resolusi Konflik

Dalam konteks penyelesaian konflik, teori resolusi konflik oleh John Paul Lederach (1997) menekankan pentingnya pendekatan jangka panjang yang melibatkan akar budaya lokal, aktor masyarakat, dan nilai-nilai kearifan lokal. Di Aceh Singkil, pendekatan berbasis adat, dialog antar pemuka agama, dan peran pemerintah daerah sangat penting untuk menciptakan harmoni.

METODOLOGI

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam dinamika konflik antara komunitas Islam dan Kristen di Aceh Singkil, serta bagaimana perubahan sosial, geografis, ekologis, dan kebencanaan memengaruhi relasi antar kelompok tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual.

2. Pendekatan dan Strategi

Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus, karena konflik di Aceh Singkil merupakan fenomena spesifik yang memiliki karakteristik lokal yang khas. Dengan strategi ini, peneliti dapat mengeksplorasi faktor-faktor penyebab dan dampak konflik secara mendalam dari sudut pandang aktor-aktor yang terlibat.

3. Lokasi Penelitian

<https://doi.org/10.56211/buana.v2i1.1000>

Lokasi penelitian difokuskan pada beberapa desa di Kabupaten Aceh Singkil yang pernah menjadi lokasi konflik antaragama, seperti Desa Suka Makmur, Desa Lae Gecih, dan Desa Dangguran. Lokasi ini dipilih berdasarkan riwayat konflik, keberagaman komunitas, serta keterlibatan langsung dalam isu kebencanaan dan perubahan lingkungan.

4. Subjek dan Informan Penelitian

Informan dipilih secara purposive sampling dengan kriteria:

- Tokoh agama (Islam dan Kristen) yang aktif dalam kegiatan komunitas.
- Aparat pemerintah daerah atau desa yang menangani isu sosial dan konflik.
- Warga yang menjadi saksi atau terdampak langsung dari konflik dan bencana.
- Aktivistis lokal atau lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam upaya rekonsiliasi.

Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan data dan prinsip saturation (data jenuh), di mana wawancara dihentikan ketika informasi yang diperoleh mulai berulang dan tidak menghasilkan temuan baru.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:

- Wawancara mendalam (in-depth interview): Untuk menggali pengalaman, pandangan, dan interpretasi para informan terhadap konflik dan perubahan sosial-ekologis yang terjadi.
- Observasi langsung: Peneliti mengamati dinamika sosial masyarakat, simbol-simbol keagamaan, serta respons komunitas terhadap bencana dan kerusakan lingkungan.
- Studi dokumentasi: Mengkaji dokumen seperti berita lokal, laporan NGO, arsip pemerintah daerah, serta peraturan terkait pendirian rumah ibadah dan penanggulangan bencana.

6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Setiap hasil wawancara dan observasi dikategorikan berdasarkan tema-tema utama seperti: akar konflik, respons masyarakat, kebijakan lokal, dampak perubahan ekologis, dan dinamika keagamaan. Data yang telah dikodekan kemudian dibandingkan secara silang untuk menemukan pola hubungan antar tema.

- Langkah-langkah analisis meliputi:
- Transkripsi data hasil wawancara dan observasi.
- Koding data secara manual atau dengan bantuan software (misalnya NVivo).
- Pengelompokan data ke dalam tema-tema relevan.
- Interpretasi dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fakta Lapangan: Pola Konflik dan Ketegangan Komunal

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat dan warga dari dua komunitas keagamaan di Aceh Singkil, terungkap bahwa ketegangan antara kelompok Islam dan Kristen sudah berlangsung lama, bahkan sebelum pecahnya konflik terbuka pada tahun 2015. Masyarakat Muslim merasa khawatir dengan bertambahnya jumlah gereja dan rumah ibadah non-Muslim, sementara pihak Kristen merasa dibatasi dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Ketegangan ini memuncak ketika terjadi pembakaran sejumlah gereja yang dianggap tidak memiliki izin resmi. Temuan ini mendukung teori konflik sosial dari Lewis A. Coser, yang menyatakan bahwa konflik muncul sebagai hasil dari perbedaan nilai dan ketimpangan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Dalam kasus Aceh Singkil, rumah ibadah menjadi simbol identitas sekaligus titik konflik karena terkait erat dengan persoalan ruang, kekuasaan, dan pengakuan.

2. Dampak Perubahan Sosial dan Demografis

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perpindahan penduduk dan peningkatan jumlah komunitas pendatang dari luar Aceh juga turut menyumbang perubahan demografis yang memicu kecemasan sosial. Beberapa desa yang dulunya

homogen kini menjadi lebih heterogen, dan hal ini menciptakan gesekan di tingkat akar rumput. Komunitas lokal merasa "dikuasai" oleh pendatang yang membawa nilai-nilai baru dan pola hidup berbeda. Hal ini sejalan dengan pandangan Soekanto (2006) bahwa perubahan sosial dapat memicu disintegrasi jika tidak diiringi dengan rekonsiliasi dan adaptasi nilai. Dalam konteks Aceh Singkil, perubahan struktur sosial tidak diimbangi dengan mekanisme integrasi, sehingga menimbulkan kecurigaan dan segregasi sosial.

3. Geografi dan Ketimpangan Akses Sumber Daya

Data lapangan juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kristen tinggal di wilayah pesisir dan terpencil yang aksesnya sangat terbatas, sementara komunitas Muslim mendominasi pusat pemerintahan dan wilayah perdagangan. Ketimpangan ini tidak hanya berpengaruh pada akses ekonomi, tapi juga pada keterwakilan dalam kebijakan publik. Menurut teori geografi politik oleh John Agnew (2003), kondisi geografis dapat menciptakan pusat dan pinggiran yang berujung pada ketimpangan struktural. Di Aceh Singkil, hal ini terlihat dari bagaimana kebijakan pembangunan lebih banyak menyentuh wilayah mayoritas, sementara minoritas merasa tertinggal dan kurang didengar.

4. Ekologi dan Kerusakan Lingkungan

Beberapa informan menyatakan bahwa konflik juga muncul akibat perubahan ekologis seperti berkurangnya lahan pertanian dan hutan akibat pembalakan liar dan alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit. Ketika ruang hidup semakin menyempit, masyarakat berebut akses terhadap sumber daya alam yang tersisa. Ketegangan pun meningkat, terutama di desa-desa yang berbatasan antara komunitas Islam dan Kristen. Teori ekologi politik dari Bryant & Bailey (1997) menjelaskan bahwa konflik sumber daya sering kali terjadi akibat ketimpangan dalam pengelolaan lingkungan. Penelitian ini menguatkan bahwa konflik Aceh Singkil tidak bisa dilepaskan dari perebutan ruang ekologis yang semakin sempit akibat eksploitasi kapitalistik.

5. Bencana sebagai Faktor Pemicu Sekunder

Wawancara juga mengungkap bahwa bencana seperti banjir dan tanah longsor kerap memperburuk situasi sosial. Masyarakat yang terdampak merasa bantuan tidak merata, terutama komunitas minoritas yang seringkali merasa diabaikan dalam penanganan pascabencana. Ketidakadilan ini memperbesar luka kolektif yang sudah ada, dan memperkuat narasi diskriminasi di tingkat lokal. Pandangan Anthony Oliver-Smith (1996) mendukung temuan ini, bahwa bencana bukan hanya krisis alam, tapi juga dapat menjadi krisis sosial ketika distribusi bantuan dan pemulihan tidak dilakukan secara adil.

6. Identitas Keagamaan dan Polarisasi Sosial

Hasil observasi menunjukkan bahwa identitas keagamaan di Aceh Singkil sangat kuat dan menjadi basis utama solidaritas sosial. Namun, identitas ini juga menjadi sekat yang memperlebar jarak antar kelompok. Pada banyak kasus, kegiatan keagamaan dijadikan ajang konsolidasi politik lokal, yang makin mempertegas batas-batas "kami" dan "mereka". Teori Identitas Sosial dari Tajfel dan Turner (1986) menjelaskan bahwa manusia cenderung menciptakan batas antara kelompok sendiri (ingroup) dan kelompok lain (outgroup). Di Aceh Singkil, hal ini terefleksi dari narasi yang berkembang di kedua komunitas—baik berupa stereotip, rasa curiga, hingga penolakan terhadap simbol-simbol keagamaan kelompok lain.

7. Minimnya Dialog dan Kegagalan Kebijakan Lokal

Temuan penting lain adalah kurangnya ruang dialog antaragama yang efektif. Pemerintah daerah belum optimal menciptakan wadah untuk menyelesaikan persoalan lintas agama secara partisipatif. Proses mediasi seringkali hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar masalah, seperti ketimpangan struktur sosial dan bias dalam penegakan hukum. Ini bertentangan dengan teori resolusi konflik dari John Paul Lederach (1997) yang menekankan pentingnya rekonsiliasi jangka panjang dengan pendekatan berbasis budaya lokal. Penelitian terdahulu oleh International Crisis Group (2016) juga menyoroti bahwa pendekatan pemerintah dalam menangani konflik Singkil terlalu administratif dan cenderung represif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik antara komunitas Islam dan Kristen di Aceh Singkil bukan hanya persoalan perbedaan agama, tetapi merupakan hasil dari akumulasi berbagai faktor seperti perubahan sosial, ketimpangan geografis, kerusakan ekologi, dan dampak bencana alam. Identitas keagamaan yang menguat tanpa ruang dialog yang sehat memperparah polarisasi sosial. Ketimpangan dalam akses sumber daya dan pelayanan publik juga menambah ketegangan. Pemerintah daerah, dalam hal

ini, belum sepenuhnya mampu menciptakan kebijakan yang adil dan inklusif terhadap seluruh kelompok masyarakat. Diperlukan upaya serius dari semua pihak—baik pemerintah, tokoh agama, maupun masyarakat—untuk membangun ruang dialog yang terbuka dan berkelanjutan. Pemerintah daerah sebaiknya menyusun kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial dan menjamin hak-hak kelompok minoritas. Selain itu, pendekatan berbasis budaya lokal, partisipasi masyarakat lintas agama, serta penanganan bencana yang adil dan merata perlu dioptimalkan agar konflik serupa tidak kembali terulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnew, J. (2003). *Geopolitics: Re-visioning World Politics*. Routledge.
- Bryant, R. L., & Bailey, S. (1997). *Third World Political Ecology*. Routledge.
- Coser, L. A. (1956). *The Functions of Social Conflict*. Free Press.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press.
- Eck, D. L. (2001). *A New Religious America: How a “Christian Country” Has Become the World’s Most Religiously Diverse Nation*. HarperSanFrancisco.
- International Crisis Group. (2016). *Indonesia: The Dark Side of Church Burnings in Aceh*. ICG Report.
- Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. United States Institute of Peace Press.
- Oliver-Smith, A. (1996). Anthropological Research on Hazards and Disasters. *Annual Review of Anthropology*, 25, 303–328.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. Dalam S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), *Psychology of Intergroup Relations* (hlm. 7–24). Nelson-Hall.
- Woodward, M. R. (2012). *Java, Indonesia and Islam*. Springer.
- Wahid Institute. (2015). *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*. Wahid Foundation.
- Kusuma, A. H. (2019). Konflik Keagamaan di Aceh Singkil: Analisis atas Ketegangan Sosial dan Ketimpangan Hukum. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2), 101–117.
- Syamsuddin, A. R. (2017). Peran Tokoh Agama dalam Penyelesaian Konflik Antarumat Beragama di Aceh. *Jurnal Harmoni*, 16(1), 1–12.
- Yanuarti, S. (2015). Resolusi Konflik Antaragama di Indonesia: Studi Kasus Aceh Singkil. *Jurnal Analisis CSIS*, 44(2), 85–102.